

9. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Atas dasar hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar menyusun Perubahan Renja Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 dimulai dengan menyusun rancangan Perubahan Renja PD setelah menerima surat edaran Walikota Blitar tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan Perubahan Renja PD berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Kemudian Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Walikota Blitar. Selanjutnya Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja PD diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan, untuk kemudian diverifikasi. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja PD kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Hasil penyempurnaan rancangan perubahan Renja PD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lambat 5 hari sejak verifikasi dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan perundang - undangan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01.03/A/31523/2023 tentang Pemetaan Menu DAK Nonfisik TA 2024 di Seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

- 1) Menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.
- 2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024.
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.232.735.499,00 atau 31,52% dari total anggaran sebesar Rp 10.255.414.291,00. Sedangkan realisasi kinerja tercapai rata-rata 31,52%. Berdasarkan tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan Hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 25,2% dan 8,7%. Capaian tersebut masih rendah karena dibandingkan dengan target Renstra, yaitu target tahun 2026. Untuk realisasi kinerja lebih besar dibanding realisasi anggaran karena ada beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tetapi proses pertanggungjawaban administrasi masih dalam proses. Misalnya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan lain lain.
2. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah 0%. Hal tersebut karena Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Perda pemberian insentif bagi investor) belum dilaksanakan. Rencana kegiatan berupa penyusunan naskah akademik dilaksanakan pada triwulan III.
3. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Promosi Penanaman Modal adalah 25% dan 0%. Capaian realisasi anggaran masih 0% karena penyusunan dokumen pertanggungjawaban administrasi kegiatan promosi Soekarno Coffe Fest masih dalam proses.
4. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal adalah 44,9% dan 5%. Hampir sama dengan program sebelumnya bahwa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tetapi dokumen pertanggungjawaban administrasi masih dalam proses.
5. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 21,7% dan 3,1%. Kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan III. Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan II adalah pendampingan penyusunan LKPM OnLine bagi pelaku usaha.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas dipengaruhi oleh:

- Faktor pendukung keberhasilan kinerja: ketersediaan anggaran, SDM yang memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: koordinasi belum optimal, proses kelengkapan administrasi agak lambat, pihak ketiga belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga).

Untuk mencapai target Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan maka Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan juknis yang berlaku.

Berikut disajikan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024:

Tabel 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama PD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
	TUJUAN																			
1	Meningkatny a Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	85,7 1 (A)		85,6 6 (A)		85,67 (A)				86,59 (A)		86,59 (A)		86,59 (A)		101%		
	Meningkatny a Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	85,7 1 (A)		85,6 6 (A)		85,67 (A)				86,59 (A)		86,59 (A)		86,59 (A)		101%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1	38.678.759. 447	84,6 5	7.461.795. 194	84.9	9.479.820.49 1	84,27	734.468.937	85,67	2.141.251 .724	85,67	2.875.720 .661	85,67	10.337.515.85 5	100,67 %	26,73%	DPMPTSP
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	50.077.463			100%	15.885.000	50,4%	0	16,3 %	0	66,7 %	0	66,7 %	0	66,70%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	6.003.936			3 Do kume n	1.904.500	2,6 doku men	0	1,10	0	3,7	0	3,7	0	17,62%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	44.073.526			3 Lap oran	13.980.500	3,45 doku men	0	0,85 dok	0	4,3	0	4,3	0	28,67%	0,00%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9.800.412.8 60			100 %	3.108.774.89 6	25%	519.837.138	25%	1.054.237 .645	50%	1.574.074 .783	50%	1.574.074.783	50,00%	16,06%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	9.796.049.8 00			26 Or ang/ bula n	3.107.390.89 6	23 org	519.837.138	23 org	1.054.237 .645	23	1.574.074 .783	23	1.574.074.783	33,33%	16,07%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39	4.363.060			1 Lap oran	1.384.000	3 doku men	0	3 doku men	0	6	0	6	0	15,38%	0,00%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	372.196.130			100 %	118.063.800	25%	0	25%	57.221.60 0	50%	57.221.60 0	50%	57.221.600	50,00%	15,37%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	197.855.629			3 Pak et	62.761.500	0	0	1	9.600.000	1	9.600.000	1	9.600.000	16,67%	4,85%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	129	174.340.501			43 Oran g	55.302.300	0	0	0	47.621.60 0	0	47.621.60 0	0	47.621.600	0,00%	27,32%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.876.488.0 47			100 %	595.238.080	24,1%	70.275.510	27,8 %	79.367.02 0	52%	149.642.5 30	52%	149.642.530	51,90%	7,97%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	78.160.878			1 Pak et	24.793.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	492.408.836			4 Pak et	156.196.300	3 paket	30.003.600	0		3	30.003.60 0	3	30.003.600	20,00%	6,09%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	77.377.734			3 Pak et	24.544.880	0	0	1,5 paket	10.960.00 0	1,5	10.960.00 0	1,5	10.960.000	16,67%	14,16%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102	284.040.250			14 Pa ket	90.100.000	5 paket	3.710.000	4 paket	10.602.50 0	9	14.312.50 0	9	14.312.500	8,82%	5,04%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	95.494.269			1 Pak et	30.291.600	0,5 paket	10.640.000	0	0	0,5	10.640.00 0	0,5	10.640.000	16,67%	11,14%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	36	56.745.000			12 D okum en	18.000.000	3 doku men	0	3 doku men	1.160.000	6	1.160.000	6	1.160.000	16,67%	2,04%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	792.261.080			25 La pora n	251.312.000	8 lapora n	25.921.910	8 lapor an	57.508.52 0	16	83.430.43 0	16	83.430.430	21,33%	10,53%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	13.888.781. 207			100 p ersen	4.765.640.35 1	0,2%	0	0,7%	756.731.1 00	0,9%	756.731.1 00	0,9%	756.731.100	0,90%	5,45%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	845.675.779			3 Uni t	268.255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	2.500.474.1 00			2 Uni t	703.171.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	10.542.631. 328			1 Uni t	3.794.212.95 1	0,1 unit	0	0,3 unit	756.731.1 00	0,4	756.731.1 00	0,4	756.731.100	40,00%	7,18%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.267.851.7 55			100 p ersen	719.382.000	25%	130.820.294	25%	182.839.6 45	50,0 %	313.659.9 39	50%	313.659.939	50,00%	13,83%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	359.687.640			36 La pora n	114.096.000	9 lapora n	49.336.754	9 lapor an	35.663.58 9	6	85.000.34 3	6	85.000.343	5,56%	23,63%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	1.908.164.1 15			39 La pora n	605.286.000	9 lapora n	81.483.540	9 lapor an	147.176.0 56	18	228.659.5 96	18	228.659.596	16,67%	11,98%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.494.426.6 38			100 p ersen	156.836.364	10%	13.535.995	30,0 %	10.854.71 4	40,0 %	24.390.70 9	40%	24.390.709	40,00%	1,63%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	326.343.219			10 U nit	103.518.864	0	13.535.995	0	10.854.714	0	24.390.709	0	24.390.709	0,00%	7,47%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	183	168.083.419			42 U nit	53.317.500	12 unit	0	24 unit	0	36	0	36	0	19,67%	0,00%	
2	Meningkatny a nilai investasi daerah		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,53		11,54		0,42		-63,8		-13,6		-13,6		-13,6		- 2566,04%		
	Meningkatny a jumlah realisasi investasi		Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	391		385,06		387		18,85		165,64		184,5		184,49		47,18%		
		Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65%	948.838.968	124,71	105.719.520	55%	169.021.100	124,3%	0	28,6%	0	28,6%	0	28,6%	105.719.520	44%	11,14%	DPMPTSP
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	3	186.064.018			1	59.021.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	137.960.966			1	43.762.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3	48.103.052			1	15.258.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DPMPTSP
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3	346.775.000			1	110.000.000	0	0	1 doku men	0	1	0	1	0	33,33%	0,00%	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	3	189.150.000			1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
			Daerah Kabupaten/ Kota																	
4		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	157.625.000			1	50.000.000	0	0	1 doku men	0	1	0	1	0	33,33%	0,00%	DPMPTSP
		Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60%	2.186.813.1 53	45,2 0%	190.537.3 50	50%	331.435.100	0	0	50%	19.092.10 0	50%	19.092.10 0	50%	209.629.450	83,33%	9,59%	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	300 %	1.202.474.1 53			100 %	331.435.100	0	0	100%	19.092.10 0	100%	19.092.10 0	100%	19.092.100	33,33%	1,59%	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3	1.202.474.1 53			1	331.435.100	0	0	1 doku men	19.092.10 0	1	19.092.10 0	1	19.092.100	33,33%	1,59%	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,7 0%	2.484.941.2 47	99,7 1%	525.068.1 76,00	99,5 0%	493.394.100	99,7%	77.495.400	99,7 %	139.078.8 86	99,7 %	216.574.2 86	99,7 %	741.642.462	100,00 %	29,85%	
5		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%	1.555.424.9 00			3	493.394.100	68,8%	77.495.400	14,3 %	139.078.8 86	14,3 %	216.574.2 86	14,3 %	216.574.286	357,50 %	13,92%	DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3434	668.825.258			110 0	212.157.100	1225 orang	22.853.400	549 orang	53.687.61 6	1774	76.541.01 6	1774	76.541.016	51,66%	11,44%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	387.636.129			4	158.275.500	6 orang	41.718.000	3 orang	10.601.135	9	52.319.135	9	52.319.135	90,00%	13,50%	
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12411	498.963.514			3976	122.961.500	647 kegiatan usaha	12.924.000	723 orang	74.790.135	1370	87.714.135	1370	87.714.135	11,04%	17,58%	
		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	2.120.481.595	75,70%	350.576.444,00	80%	388.764.000	32,43%	27.841.576	32,43%	93.506.876	32,43%	121.348.452	32,4%	471.924.896	38,15%	22,26%	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375	1.282.493.745			125	388.764.000	49	27.841.576	251 perusahaan	93.506.876	300	121.348.452	300	121.348.452	80,00%	9,46%	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24	192.371.855			7	54.864.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000	705.375.028			300	258.460.900	0	27.841.576	100 orang	90.034.876	100	117.876.452	100	117.876.452	10,00%	16,71%	

o	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggu ng jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		10 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	39	384.746.863			13	75.439.100	0	0	3 kegia tan usah a	3.472.000	3	3.472.000	3	3.472.000	7,69%	0,90%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja DPMPSTSP Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang perubahan pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Kinerja tujuan dan sasaran DPMPSP Kota Blitar tahun 2024 terdapat perubahan target (meningkat) dikarenakan realisasi kinerja yang telah melebihi target tahun 2024 yaitu pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	TUJUAN Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (<i>Online Single Submission</i>)	0,42%	0,504%
2	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	84,9	85,67
1	SASARAN Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (<i>Online Single Submission</i>)	168,5	387
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	84,9	85,67

Selain itu, guna optimalisasi pelayanan penanaman modal, perlu adanya langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut sesuai LKJIP Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (Tahap II) dan Launching	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

No	Langkah perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Meningkatkan regulasi penanaman modal	Menyusun perda pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line	Pengembangan aplikasi SIMIJIN	Program/kegiatan tercover di dinas teknis (Diskominfotik)

Program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Renja Tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan yang dilaksanakan adalah pergeseran anggaran antar program/ kegiatan/ sub kegiatan. Pengurangan anggaran juga dilaksanakan karena ada refocusing anggaran, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada. Sedangkan pergeseran anggaran dilaksanakan karena terdapat efisiensi pada beberapa sub kegiatan sehingga hasil efisiensi digunakan pada sub kegiatan lain supaya lebih optimal.

Berikut adalah Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2024
Yang Mengalami Perubahan

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	84,5	9.479.820.491	8.065.764.891	
	2	18	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	15.885.000	15.885.000	
	2	18	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	7 dokumen	1.904.500	1.904.500	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	3 dokumen	5 dokumen	13.980.500	13.980.500	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	3.108.774.896	2.985.078.487	
	2	18	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	23 org	3.107.390.896	2.983.694.487	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	13 dokumen	1.384.000	1.384.000	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	118.063.800	144.652.300	
	2	18	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	62.761.500	27.900.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40 org	40 org	55.302.300	116.752.300	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	595.238.080	503.977.180	
	2	18	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	24.793.300	24.793.300	
	2	18	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5 paket	156.196.300	124.385.400	Penyesuaian belanja

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
	2	18	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	24.544.880	24.544.880	
	2	18	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 paket	34 paket	90.100.000	55.650.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.291.600	30.291.600	
	2	18	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	18.000.000	18.000.000	
	2	18	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 dokumen	27 dokumen	251.312.000	226.312.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	4.765.640.351	3.565.447.160	
	2	18	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	4 paket	268.255.600	235.823.905	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	51 unit	703.171.800	707.185.800	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	3.794.212.951	2.622.437.455	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	719.382.000	693.888.400	
	2	18	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 dokumen	36 dokumen	114.096.000	173.118.400	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 dokumen	36 dokumen	605.286.000	520.770.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	156.836.364	156.836.364	
	2	18	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	5 unit	103.518.864	103.518.864	
	2	18	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 unit	61 unit	53.317.500	53.317.500	
	2	18	2	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	55%	55%	169.021.100	159.021.100	
	2	18	2	2'01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	59.021.100	59.021.100	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
	Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024								
	2	18	2	2'01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	43.762.400	43.762.400	
	2	18	2	2.01	0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 kerjasama	1 kerjasama	15.258.700	15.258.700	
	2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	100.000.000	
	2	18	2	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	50.000.000	Penyesuaian belanja
	2	18	2	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	
	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	50%	50%	331.435.100	395.069.700	
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	100%	331.435.100	395.069.700	
	2	18	3	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	331.435.100	395.069.700	Penyesuaian belanja
	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,5 %	99,5 %	493.394.100	506.600.800	
	2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3%	3%	493.394.100	506.600.800	
	2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1100 orang	1100 orang	212.157.100	194.173.400	Penyesuaian belanja
	2	18	4	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 org	4 org	122.961.500	121.855.400	Penyesuaian belanja
	2	18	4	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	3.976 kegiatan usaha	3.976 kegiatan usaha	158.275.500	190.572.000	Penyesuaian belanja

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	Renja 2024			Renja Perubahan 2024				
							Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					
	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	80 %	80 %	388.764.000	406.818.000	
	2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	125 perusaha an	125 perusaha an	388.764.000	406.818.000	
	2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 masalah	7 masalah	54.864.000	61.022.000	Penyesuaian pagu DAK
	2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	220 orang	300 orang	258.460.900	223.751.000	Penyesuaian pagu DAK
	2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 kegiatan usah	13 kegiatan usah	75.439.100	122.045.000	Penyesuaian pagu DAK
							TOTAL			10.862.434.791	9.533.274.491	

Tabel 3.4 Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1	84,5	84,5	9.479.820.491	8.759.784.894	8.065.764.891					84,5	9.479.820.491		
2	18	1	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	15.885.000	15.885.000	15.885.000					100%	15.885.000		
2	18	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	21 doku men	7 dok umen	7 doku men	1.904.500	1.904.500	1.904.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	3 doku men	1.904.000	
2	18	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	15 doku men	5 doku men	5 dokum en	13.980.500	13.980.500	13.980.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	3 Lapo ran	13.980.500	
2	18	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100 %	3.108.774.896	2.881.668.145	2.985.078.487						100 %	3.108.774.896	
2	18	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 org	23 org	23 org	3.107.390.896	2.880.284.145	2.983.694.487	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	26 org	3.107.390.896	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	18	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	39 doku men	13 doku men	13 dokum en	1.384.000	1.384.000	1.384.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	1 Lapora n	1.384.000	Dinas Penana man Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
2	18	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	118.063.800	150.590.900	144.652.300					100%	118.063.800		
2	18	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	1 paket	2 paket	62.761.500	27.900.000	27.900.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	2 paket	62.761.500	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	18	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	129 org	43 org	43 org	55.302.300	122.690.900	116.752.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	40 org	56.302.300	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	595.238.080	503.977.180	503.977.180						100%	595.238.080	
2	18	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	24.793.300	24.793.300	24.793.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	1 paket	24.793.300	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	156.196.300	124.385.400	124.385.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	4 paket	156.196.300	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	18	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	3 paket	3 paket	24.544.880	24.544.880	24.544.880	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	3 paket	24.544.880	Dinas Penana man Modal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJM D	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	
													Alokasi Umum	berkualitas dan berkeadilan			dan PTSP			
2	1 8	1	2 .06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102 paket	34 paket	34 paket	90.100.000	55.650.000	55.650.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	15 paket	90.100.000	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	1	2 .06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	30.291.600	30.291.600	30.291.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	1 paket	30.291.600	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	1	2 .06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36 doku men	12 doku men	12 dokum en	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	12 dokum en	18.000.000	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	1	2 .06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 doku men	25 doku men	25 dokum en	251.312.000	226.312.000	226.312.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	25 la poran	251.312.000	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	1	2 .07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	4.765.640.351	4.334.456.305	3.565.447.160						100%	4.765.640.351	
2	1 8	1	2 .07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	268.255.600	235.823.905	235.823.905	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	2 paket	268.255.600	
2	1 8	1	2 .07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	7 unit	7 unit	703.171.800	654.055.600	707.185.800	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penana man Modal & PTSP	2 unit	703.171.800	
2	1 8	1	2 .07	9	Pengadaan Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	3.794.212.951	3.444.576.800	2.622.437.455	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Transformasi Ekonomi sebagai	Dinas Penana man	-	3.794.212.961	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan				Nasional	Daerah			
						Lainnya yang Disediakan							Alokasi Umum	berkualitas dan berkeadilan	Dampak COVID – 19	Modal & PTSP				
2	18	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	719.382.000	716.371.000	693.888.400					100%	719.382.000		
2	18	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	114.096.000	144.712.000	173.118.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	36 laporan	114.096.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	605.286.000	571.659.000	520.770.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	39 Laporan	605.286.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	209		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	156.836.364	156.836.364	156.836.364						100%	156.836.364	
2	18	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	3 unit	3 unit	103.518.864	103.518.864	103.518.864	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	5 unit	103.518.864	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 unit	61 unit	61 unit	53.317.500	53.317.500	53.317.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	60 unit	53.317.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	2	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65%	55%	55%	169.021.100	129.021.100	159.021.100						55%	169.021.100	
2	18	2	201		Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	59.021.100	59.021.100	59.021.100						1 dokumen	59.021.100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggu ng Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
					yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	penanaman modal yang ditetapkan														
2	1 8	2	2 ' 0 1	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 doku men	1 doku men	1 dokum en	43.762.400	43.762.400	43.762.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat/Pen gusaha	1 dokum en	43.762.400	
2	1 8	2	2 ' 0 1	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 kerjas ama	1 kerja sama	1 kerjas ama	15.258.700	15.258.700	15.258.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat/Pen gusaha	1 kegiat an usaha	15.258.700	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	2	2 ' 0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3 doku men	1 doku men	1 dokum en	110.000.000	70.000.000	100.000.000						1 dokum en	110.000.000	
2	1 8	2	2 ' 0 2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	3 doku men	1 doku men	1 dokum en	60.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat/Pen gusaha	1 dokum en	60.000.000	
2	1 8	2	2 ' 0 2	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 doku men	1 doku men	1 dokum en	50.000.000	20.000.000	50.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat/Pen gusaha	1 dokum en	50.000.000	
2	1 8	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60%	50%	50%	331.435.100	439.206.797	395.069.700						50%	331.435.100	
2	1 8	3	2 ' 0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	100%	100%	331.435.100	439.206.797	395.069.700						100%	331.435.100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	1	3	2	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 doku men	1 doku men	1 dokum en	331.435.100	439.206.79 7	395.069.70 0	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat/Pen gusaha Kota Blitar	1 dokum en	331.435.10 0	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1	8	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,70 %	99,5 %	99,5 %	493.394.100	520.583.50 0	506.600.80 0						99,6 %	493.394.10 0	
2	1	8	4	2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%	3%	3%	493.394.100	520.583.50 0	506.600.80 0						3%	493.394.10 0	
2	1	8	4	2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3.434 orang	1100 orang	1100 orang	212.157.100	199.987.10 0	194.173.40 0	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat Pemoho n Izin	1100 pelaku usaha	212.157.10 0	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1	8	4	2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 org	4 org	4 org	122.961.500	132.431.50 0	121.855.40 0	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat Pemoho n Izin	4 org	158.275.50 0	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1	8	4	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	12.41 1 kegiat an usaha	3.976 kegia tan usah a	3.976 kegiat an usaha	158.275.500	188.164.90 0	190.572.00 0	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyara kat Pemoho n Izin	3976 pelaku usaha	122.961.50 0	Dinas Penana man Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan				Nasional	Daerah			
						berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha														
2	1 8	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	80 %	80 %	388.764.000	406.818.00 0	406.818.00 0					80%	388.764.00 0		
2	1 8	5	2 .0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375 perus ahaan	125 p erusa haan	125 pe rusah aan	388.764.000	406.818.00 0	406.818.00 0	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	125 pe rusah aan	388.764.00 0		
2	1 8	5	2 .0 1	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 masal ah	7 masa lah	7 masal ah	54.864.000	61.022.000	61.022.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusa ha di Kota Blitar	8 kegiat an usaha	54.864.000	Dbv inas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	5	2 .0 1	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 orang	300 orang	300 orang	258.460.900	223.751.00 0	223.751.00 0	Kota Blitar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusa ha di Kota Blitar	220 pelaku usaha	258.460.90 0	Dinas Penana man Modal dan PTSP
2	1 8	5	2 .0 1	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	39 kegiat an usah	13 kegiat an usah	13 kegiat an usah	75.439.100	122.045.00 0	122.045.00 0	Kota Blitar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusa ha di Kota Blitar	8 kegiat an usah	75.439.100	Dinas Penana man Modal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penangg ung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
								Semu la	Menja di	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan				Nasional		Daerah
						Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						Khusus Non Fisik				dan PTSP		
Total pagu								10.862.434.7 91	10.255.414. 291	9.533.274. 491								

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana Tabel 3 diatas dengan fokus pada:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan tempat penyelenggaraan pelayanan terpadu agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat.
2. Menyelenggarakan promosi investasi dengan konsep yang berbeda/tidak monoton yang lebih menarik agar calon investor mengetahui potensi yang dimiliki Kota litar sehingga tertarik untuk berinvestasi.
3. Bimtek OSS dan pendampingan LKPM agar pelaku usaha tertib dalam pelaporan LKPM.
4. Meningkatkan sosialisasi perizinan kepada masyarakat sekaligus pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha agar masyarakat yang mempunyai usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Menerapkan Role Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara penuh sesuai Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, antara lain melalui :
 - a. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan;
 - b. Optimalisasi peran Tim teknis perizinan;
 - c. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang *Customer Service Excellent*.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renca Kerja Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, indikator, target atau sasaran. Karena pada pelaksanaan kegiatan sering terjadi hal-hal diluar perencanaan sebelumnya sehingga perlu disesuaikan.

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah:
 - 1. Program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 telah disesuaikan pada perubahan Renja tahun 2024 sehingga target kinerja hendaknya daat dicapai sesuai target.
 - 2. Pelaksanaan kegiatan PAK yang terbatas hendaknya disusun jadwal kegiatan sejak dini dan kelengkapan administrasi disiapkan lebih awal.
- b) Kaidah-kaidah pelaksanaan:
 - 1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
 - 2. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 memfokuskan pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.
 - 3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
 - 4. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan perubahan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
- c) Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan/atau perubahan program/kegiatan/sub kegiatan.
 - 2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.
 - 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.